

**Izin Poligami karena Istri Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban (Tinjauan Yuridis
Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 947/Pdt.G/2019/PA.Ba)**

Disusun Oleh:

ZIANA RIFDA FARNIDA

E1A015071

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, guna memenuhi kebutuhan yang bersifat jasmani maupun rohani seluruh agama memerintahkan umatnya untuk hidup berpasang-pasangan dalam suatu ikatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, hal ini disebut dengan perkawinan. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal, namun demikian banyak keluarga yang tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sehingga mencari solusi dengan melakukan poligami. Pengaturan mengenai poligami terdapat dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 947/Pdt.G/2019/PA.Ba). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian prospektif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif yang sistematis.

Hasil penelitian mengenai Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor : 947/Pdt.G/2019/PA.BA, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami karena istri pertama sudah tidak dapat melayani/ tidak mau melayani Pemohon melakukan hubungan layaknya suami istri bahwa Hakim mengabulkan keinginan Pemohon dengan dasar Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (c) PP Nomor 9 Tahun 1975. Namun pada putusan perkara tersebut pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dapat dilengkapi dengan Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Kata kunci: *Perkawinan, Poligami*

Permit for Polygamy because the Wife Cannot Fulfill the Obligations (Juridical Review of the Banjarnegara Religious Court Decision Number 947 / Pdt.G / 2019 / PA.Ba)

By :

ZIANA RIFDA FARNIDA

E1A015071

ABSTRACT

Humans are social beings who cannot live alone. In order to fulfill physical and spiritual needs, all religions instruct their followers to live in pairs in a bond by fulfilling certain conditions, this is called marriage. The purpose of marriage is to form a happy family, however, many families cannot achieve the goal of marriage, so they seek a solution by practicing polygamy. The regulation regarding polygamy is contained in Article 3 Paragraph (2) of Law No.1 of 1974 concerning Marriage.

This provision opens the possibility for a husband to practice polygamy with court permission. This study aims to determine the legal considerations of judges in granting applications for polygamy permits because wives cannot fulfill obligations (Juridical Review of the Banjarnegara Religious Court Decision Number 947 / Pdt.G / 2019 / PA.Ba). The research method used is normative juridical with analytical research specifications. The data used in this research is secondary data sourced from literature studies and statutory regulations and their implementing regulations. The data that has been obtained are then processed and analyzed using qualitative methods and presented in the form of a systematic description.

The results of research regarding the Polygamy Permit because the Wife Cannot Fulfill the Obligations of the Banjarnegara Religious Court Decision Number: 947 / Pdt.G / 2019 / PA.BA, the legal considerations of the judge in granting the polygamy permit because the first wife was unable to serve / did not want to serve a husband-wife relationship that the Judge granted the Petitioner's wish on the basis that the Petitioner had met the cumulative requirements for a second marriage (polygamy) as intended in Article 5 paragraph (1) of Law No.1 of 1974 jo Article 41 letter (c) of Government Regulation Number 9 Year 1975. However, in the verdict of the case, the Judge's consideration in granting the application for a polygamy permit could be supplemented by Article 4 letter (a) of Law Number 1 of 1974, Article 33 of Law Number 1 of 1974, Article 55 paragraph (2) Compilation of Islamic Law and Article 41 letter (d) Government Regulation Number 9 of 1975.

Keywords : *Marriage, polygamy*